



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN

KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI

RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024

KE PROVINSI RIAU

*

*

*

**

**

*

*

*

JAKARTA 2024



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IV DPR RI
RESES MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2023-2024
KE PROVINSI RIAU
15 s.d. 19 JULI 2024

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun 2023-2024 ke Provinsi Riau dalam rangka meninjau dan menghimpun informasi terkait dengan permasalahan Bidang Pangan dan Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun dasar hukum dari Kunjungan Kerja ini mengacu pada:

1. Peraturan Dewan Perwakilan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Badan Musyawah DPR RI tanggal 25 Maret 2024.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 15 Mei 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Riau adalah:

1. Mendengarkan penjelasan, berdialog, dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, Mitra Kerja Komisi IV DPR RI terkait ketersediaan, pasokan dan harga pangan di Provinsi Riau.
2. Melakukan dialog dan diskusi untuk mendapatkan informasi dari Pemerintah Daerah, Mitra Kerja Komisi IV DPR RI perihal penyelesaian kebun sawit

rakyat yang telah terbangun di dalam kawasan hutan dan pengembangan sawit rakyat.

3. Meninjau infrastruktur Unit Pengolahan Ikan Patin (Poklahsar) guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing, serta melihat sistem bisnis dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

C. RUANG LINGKUP

Sasaran Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI meliputi Bidang Pangan dan Pertanian, Lingkungan Hidup dan kehutanan, serta Kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau.

D. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Riau dipimpin oleh Bapak Sudin, S.E. dan diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

E. LOKASI DAN PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Pelaksanaan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Riau dilaksanakan pada tanggal 15 s.d. 19 Juli 2024, dengan lokasi kunjungan sebagai berikut:

1. Kabupaten Pelalawan.
2. Gudang Bulog Regional Jaddirejo.
3. Unit Pengolahan Ikan Patin di Kota Pekanbaru.

II. GAMBARAN UMUM

A. Provinsi Riau

Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pantai timur pulau Sumatra bagian tengah. Wilayah pesisirnya berbatasan dengan Selat Malaka. Hingga tahun 2004, provinsi ini juga meliputi Kepulauan Riau, sekelompok besar pulau-pulau kecil (pulau-pulau utamanya antara lain Pulau Batam dan Pulau Bintan) yang terletak di sebelah Timur Sumatra dan sebelah Selatan Singapura. Kepulauan ini dimekarkan menjadi provinsi tersendiri pada Juli 2004.

Riau saat ini merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia, dan sumber

dayanya didominasi oleh sumber alam, terutama minyak bumi, gas alam, karet, kelapa sawit dan perkebunan serat. Perkebunan yang berkembang adalah perkebunan karet dan perkebunan kelapa sawit, baik itu yang dikelola oleh negara ataupun oleh rakyat. Selain itu juga terdapat perkebunan jeruk dan kelapa. Untuk luas lahan perkebunan kelapa sawit saat ini provinsi Riau telah memiliki lahan seluas 1,76 juta hektare, dan produksi CPO di Provinsi Riau sebanyak 8,74 juta ton, menurut data BPS tahun 2022.

B. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Riau. Ibu Kota Kabupaten Pelalawan berada di Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk kabupaten ini pada akhir tahun 2023 berjumlah 422.445 jiwa, dengan luas wilayah 13.067,29 km², dan kepadatan penduduk 32 jiwa/km². Kabupaten Pelalawan dengan luas 13.067,29 km², dibelah oleh aliran Sungai Kampar, serta pada kawasan ini menjadi pertemuan dari Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung, dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, Pulau Baru Pulau Ketam, dan Pulau Untut.

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit, dataran rendah membentang ke arah timur dengan luas wilayah mencapai 93 % dari total keseluruhan. Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban, dan temperatur udara agak tinggi.

C. Potensi Perikanan

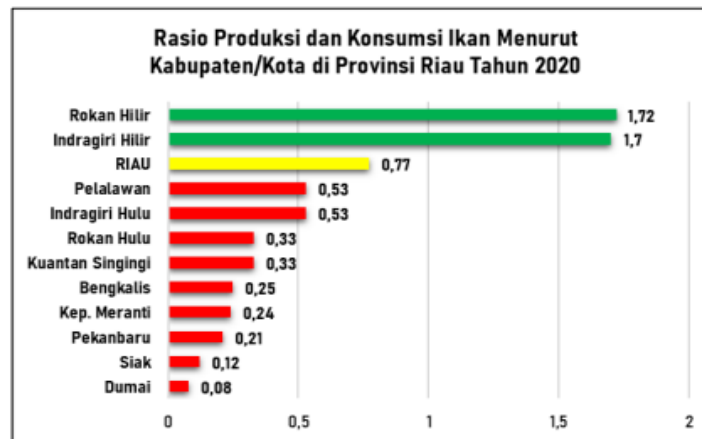
Perkembangan produksi perikanan Provinsi Riau sejak Tahun 2016–2020 cenderung mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,31%, demikian juga laju pertumbuhan kebutuhan konsumsi pertahun dengan rata-rata 3,38%. Sedangkan untuk rasio produksi dan konsumsi ikan di Provinsi Riau dalam kurun waktu yang sama mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,04%.

Rasio Produksi dan Konsumsi Ikan di Provinsi Riau Tahun 2016–2020

Komoditas	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun(%)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Produksi (Ton)	219.406,20	239.069,41	259.071,07	246.222,59	228.667,53	1,31%
Konsumsi (Ton)	260.038,84	282.029,11	293.858,88	302.650,11	296.244,00	3,38%
Perimbangan (Ton)	-40.632,64	-42.959,70	-34.787,81	-56.427,52	-67.576,57	17,17%
Rasio	0,84	0,85	0,88	0,81	0,77	-2,04%

Sumber: BPS Provinsi Riau (Riau Dalam Angka Tahun 2021)

Pada tahun 2020 rasio produksi dan konsumsi ikan menurut kabupaten/kota yang berada diatas rata-rata Provinsi Riau sebesar 0,77 yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Indragiri Hilir dimana produksi ikan lebih besar dibandingkan dengan konsumsinya. Sementara itu 10 kabupaten/kota lainnya memiliki rasio di bawah rata-rata Provinsi Riau dan yang paling rendah adalah Kota Dumai sebesar 0,08.



Gambar Perbandingan rasio produksi dan konsumsi ikan Provinsi Riau & Kabupaten/Kota tahun 2020

Rata-rata pertumbuhan produksi perikanan cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 sebesar 1,31% per tahun. Pada tahun 2020 total produksi perikanan tangkap dilaut mengalami kenaikan sebesar 228.670,16ton dibandingkan total produksi tahun 2016 yaitu sebesar 219.406,20 ton. Sedangkan untuk usaha perikanan tangkap di perairan umum mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 20,674,62 ton dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 27.406,6 ton. Pada tahun 2020 sektor perikanan tangkap di laut merupakan sektor penghasil terbesar sedangkan sektor budi daya jaring apung di laut merupakan yang paling kecil sebesar 11,22 ton.

Produksi Perikanan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2020

No	Kabupaten/Kota	Jenis Usaha Perikanan									Jumlah	Kontribusi (%)
		Perikanan Tangkap di Laut	Perairan Tangkap di Perairan Umum	Budidaya di Tambak	Budi daya di Kolam	Budidaya di Keramba	Budidaya Jaring Apung di Perairan Umum	Keramba Jaring Tancap di Perairan Umum	Budidaya Jaring Apung di Laut	Budidaya Laut		
1	Kuantan Singingi	0	383,71	0	3.759,10	42,4	0	0	0	0	4.185,21	1,8
2	Indragiri Hulu	0	5.317,28	0	3.819,18	132,1	0	0	0	0	9.268,56	4,1
3	Indragiri Hilir	46.558,30	5.323,39	1.000,35	247,49	0	2,03	0	0	0	53.131,56	23,2
4	Pelalawan	1.824,50	2.054,42	3,59	6.905,70	239,14	115,58	0	0	0	11.142,93	4,9
5	Siak	1134,38	545,09	0	859,79	0	9,09	29,66	0	0	2.578,01	1,1
6	Kampar	0	2.306,67	0	35.692,04	9.266,95	11.359,49	0	0	0	58.625,15	25,6
7	Rokan Hulu	0	1.740,39	0	7.197,48	0	206,21	0	0	0	9.144,08	4
8	Bengkalis	4.884,78	121,97	747,8	62,39	0	0	0	0	0	5.816,94	2,5
9	Rokan Hilir	46.861,36	2.816,28	0	820,22	0	118,55	0	0	10.734,09	61.350,50	26,8
10	Kep. Meranti	2.229,24	0	6,17	49,37	0	0	0	0	0	2.284,78	1
11	Pekanbaru	0	65,42	0	49,46	0	9.974,88	0	0	0	10.089,76	4,4
12	Dumai	700,9	0	130,64	179,98	0	0	27,24	0	0	1.038,76	0,5
	Riau	104.193,46	20.674,62	1.888,55	59.642,20	9.680,59	21.785,83	56,9	11,22	10.734,09	228.667,46	100

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2020

Kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB di Provinsi Riau tahun 2016-2029 mengalami pertumbuhan berfluktuatif dan cenderung mengalami peningkatan dari 2,64% pada tahun 2016 menjadi 3,13% pada tahun 2020. Hal ini tantangan bagi Provinsi Riau untuk mengembangkan sektor perikanan menjadi unggulan devisa negara dan kesejahteraan rakyat.

III. HASIL KUNJUNGAN

A. Kabupaten Pelalawan

1. Paparan Pemerintah Daerah

a. Permasalahan Kebun Sawit Rakyat di Dalam Kawasan Hutan

Kabupaten Pelalawan memiliki luas perkiraan 1,3 juta hektare dan memiliki penduduk dengan jumlah 450 ribuan, dengan 12 kecamatan dan 118 desa dan kelurahan. Kabupaten Pelalawan juga memiliki potensi-potensi salah satunya adalah perkebunan dengan potensi total 500.000 hektar kebun kelapa sawit, termasuk di dalamnya perkebunan sawit yang berada di wilayah Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Saat ini ada sekitar 33.000 hektare lahan sawit petani yang berada di kawasan TNTN mengalami permasalahan, terutama mereka tidak bisa mengurus identitas kependudukannya tersebut karena masuk dalam kawasan konservasi Tesso Nilo, sementara masyarakat sudah tinggal di wilayah tersebut belasan hingga puluhan tahun dan listrik pun belum bisa dinikmati oleh masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten

Pelalawan menginginkan solusi secara jangka panjang yang harus diambil oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI.

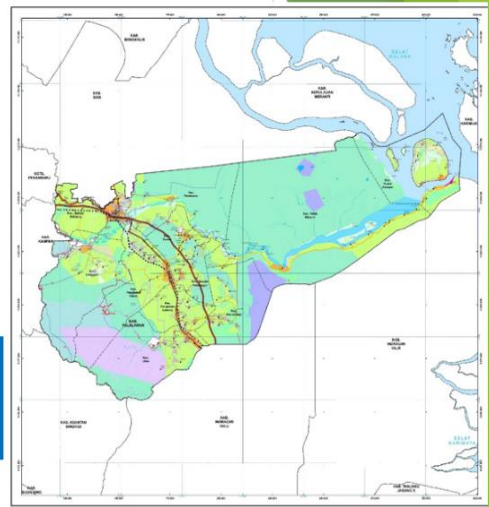
Selain permasalahan kebun sawit yang berada di dalam kawasan taman nasional, saat ini di Kabupaten Pelalawan memiliki banyak kebun sawit rakyat yang berada di dalam kawasan hutan, baik hutan produksi terbatas maupun hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

PERMASALAHAN PENYELASAIAN SAWIT RAKYAT YANG TERBANGUN DIDALAM KAWASAN HUTAN DI KABUPATEN PELALAWAN

■ **LUAS WILAYAH : 1.382.210,08 Ha**
■ **WILAYAH DARATAN : 1.315.579,44**
■ **WILAYAH LAUT : 66.630,64**

■ **LUAS KAWASAN HUTAN : 872,641 HA**

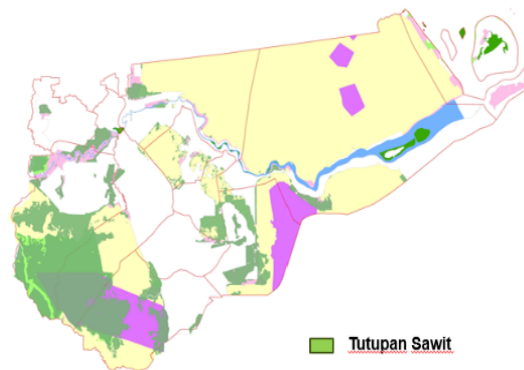
■ **LUAS KAWASAN HUTAN : 63,13 % DARI LUAS WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN**



TOTAL LUAS KEBUN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN PELALAWAN 505.107,65 HA

■ **DI DALAM KAWASAN HUTAN = 207.166 HA**

■ **DI LUAR KAWASAN HUTAN (APL) = 297.941,65 HA**



SUMBER INFORMASI
■ PEMPROV RIAU (BAPEDA/OLHK PEMPROV TAHUN 2021)

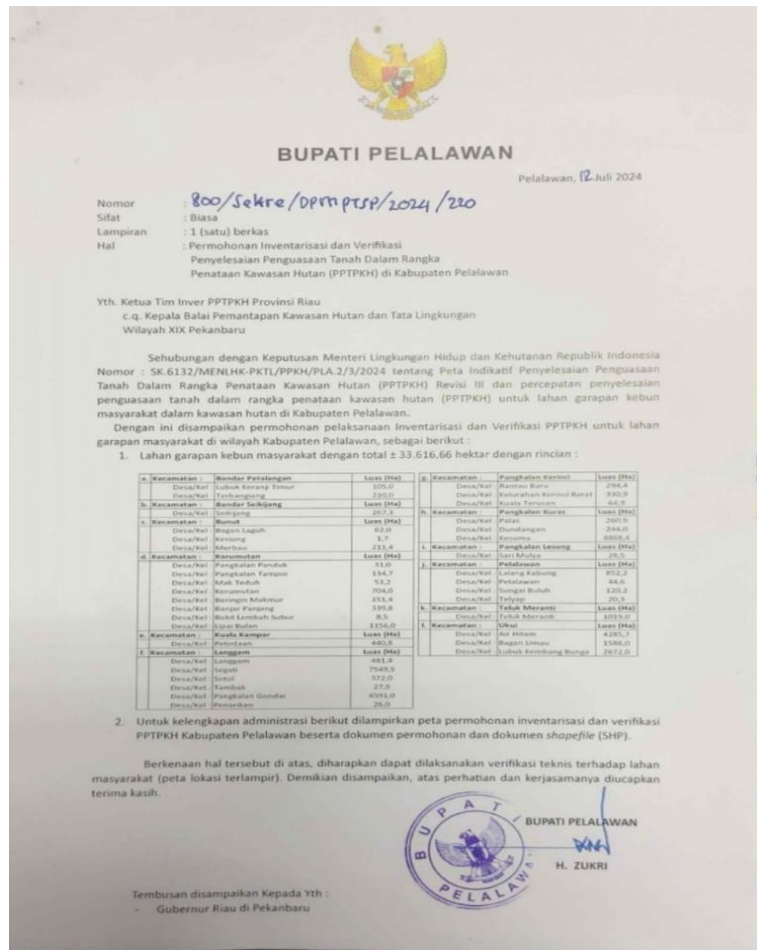
PENGUKURAN DAN PENDATAAN KEBUN KELAPA SAWIT MASYARAKAT YANG BERADA DI DALAM KAWASAN HUTAN SELUAS ± 33.616,66 HA

a. Kecamatan :	Bandar Petalangan	Luas (Ha)	g. Kecamatan :	Pangkalan Kerinci	Luas (Ha)
Desa/Kel :	Lubuk Keranji Timur	105,0	Desa/Kel :	Rantau Baru	294,4
Desa/Kel :	Terbangiang	210,0	Desa/Kel :	Kelurahan Kerinci Barat	330,9
b. Kecamatan :	Bandar Seikijang	Luas (Ha)	Desa/Kel :	Kuala Terusan	64,9
Desa/Kel :	Seikijang	267,3	h. Kecamatan :	Pangkalan Kuras	Luas (Ha)
c. Kecamatan :	Bunut	Luas (Ha)	Desa/Kel :	Palas	260,9
Desa/Kel :	Bagan Laguh	62,0	Desa/Kel :	Dundangan	244,0
Desa/Kel :	Keriong	1,7	Desa/Kel :	Kesuma	4868,4
Desa/Kel :	Merbau	211,4	i. Kecamatan :	Pangkalan Lesung	Luas (Ha)
d. Kecamatan :	Kerumutan	Luas (Ha)	Desa/Kel :	Sari Mulya	28,5
Desa/Kel :	Pangkalan Panduk	31,0	j. Kecamatan :	Pelalawan	Luas (Ha)
Desa/Kel :	Pangkalan Tampoi	134,7	Desa/Kel :	Lalang Kabung	852,2
Desa/Kel :	Mak Teduh	53,2	Desa/Kel :	Pelalawan	44,6
Desa/Kel :	Kerumutan	704,0	Desa/Kel :	Sungai Buluh	120,2
Desa/Kel :	Beringin Makmur	151,4	Desa/Kel :	Telyap	20,3
Desa/Kel :	Banjar Panjang	339,8	k. Kecamatan :	Teluk Meranti	Luas (Ha)
Desa/Kel :	Bukit Lembah Subur	8,5	Desa/Kel :	Teluk Meranti	1019,0
Desa/Kel :	Lipai Bulan	1156,0	l. Kecamatan :	Ukui	Luas (Ha)
e. Kecamatan :	Kuala Kampar	Luas (Ha)	Desa/Kel :	Air Hitam	4285,7
Desa/Kel :	Petodaan	440,8	Desa/Kel :	Bagan Limau	1586,0
f. Kecamatan :	Langgam	Luas (Ha)	Desa/Kel :	Lubuk Kembang Bunga	2672,0
Desa/Kel :	Langgam	481,4			
Desa/Kel :	Segati	7549,5			
Desa/Kel :	Sotol	372,0			
Desa/Kel :	Tambak	27,9			
Desa/Kel :	Pangkalan Gondai	4591,0			
Desa/Kel :	Penarikan	26,0			

Langkah langkah yang telah dilakukan dalam rangka penyelesaian permasalahan keterlanjuran sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan, antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Pelalawan memfasilitasi kegiatan pengukuran dan pendataan kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan sampai saat ini telah terukur seluas ± 33.616,66 ha.
- 2) Kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan telah masuk ke dalam SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.
- 3) Kebun sawit masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan telah masuk dalam peta indikatif dan sudah bermohon untuk dapat persetujuan penggunaan kawasan hutan melalui skema PP Nomor 24 Tahun 2021.
- 4) Bupati Pelalawan telah mengusulkan untuk dilakukan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH) di Kabupaten Pelalawan kepada ketua tim inver PPTPKH Provinsi Riau c.q. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX

Pekanbaru.



b. Usulan Lumbung Padi di Kuala Kampar

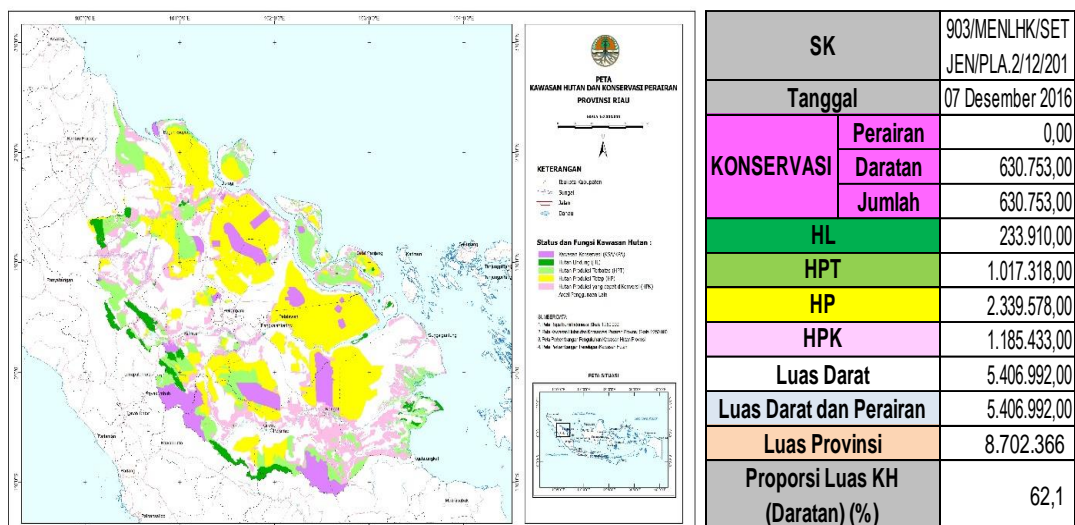
Bupati Pelalawan juga meminta dukungan dari Kementerian dan Komisi IV DPR RI terkait potensi lumbung padi yang berada di Kuala Kampar. Pelalawan juga memiliki potensi pangan dan salah satu yang terluas ada di Kecamatan Kuala Kampar. Kecamatan Kuala Kampar berbatasan

langsung dengan Kepulauan Riau, berbatasan langsung dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun, dan sekarang eksisting lahan yang dikelola oleh petani di situ ada 5.500 hektar dan masih memiliki potensi yang lebih lagi. 5.500 hektar ini adalah satu hamparan yang berada di 3-4 desa di satu kecamatan dan di satu pulau. Problemnya bahwa di areal kawasan pangan tersebut memakai pola IP100 dan tahun 2024 kita baru menguji coba IP200 sekitar 504 hektar, artinya ada potensi 5.500 hektar lagi yang memungkinkan IP200 menjadi salah satu sumber pangan nasional. Permasalahan yang dihadapi saat ini cukup tinggi sekali karena terkait abrasi air laut dan infrastruktur yang jauh dari harapan.

2. Aspirasi Warga

Dalam sesi diskusi serta tanya jawab, Kepala Desa Beringin Makmur Kecamatan Kerumutan - Sulkan Nasution menyampaikan bahwa kebun kelapa sawit sudah berumur 30 tahun. Beberapa tahun lalu sudah mengajukan program PSR dari luas kebun sawit yang ada 1150 ha, tetapi 800 ha baru disetujui dan sisanya tidak disetujui, dengan alasan masuk dalam kawasan HPK, sedangkan lahan tersebut sudah memiliki sertifikat padahal sudah bermukim sekitar 1988 yang lalu yaitu transmigrasi, seharusnya apabila sudah bersertifikat sudah tidak menjadi masalah lagi.

3. Paparan Kementerian/Lembaga



Riwayat Kawasan Hutan Provinsi Riau

1986	1. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, tentang penunjukan areal hutan di wilayah Provinsi Riau sebagai kawasan hutan seluas ± 9.456.160 hektar.
2011	2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
2014	3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi menjadi bukan kawasan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan di Provinsi Riau.
2014	4. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/ Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
2016	5. Keputusan Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan di Provinsi Riau.
2016	6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
2021	7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.6612/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Riau sampai dengan Tahun 2020

DASAR HUKUM PENYELESAIAN PENGUSAHAAN DALAM KAWASAN HUTAN UUCK NO 11 TAHUN 2020 PASAL 110B dan 50 A SEBAGAI Jo UU 18 2013 P3H

PASAL 110B

01

Setiap orang yang melakukan pelanggaran dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, dan/atau Pasal 17 ayat (2) huruf b, huruf c, dan/atau huruf e, atau kegiatan lain di kawasan hutan tanpa memiliki Perizinan Berusaha yang dilakukan sebelum berlakunya UU ini dikenai sanksi administratif, berupa:

- a penghentian sementara kegiatan usaha; b pembayaran denda administratif, dan/atau c paksaan pemerintah

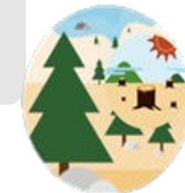


02

Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan paling singkat 5 tahun secara terus menerus dengan luasan paling banyak 5 hektar, **dikecualikan dari sanksi administratif dan diselesaikan melalui penataan kawasan hutan.**

03

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelesaian sanksi administratif dan tata cara penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.



NEW TORA

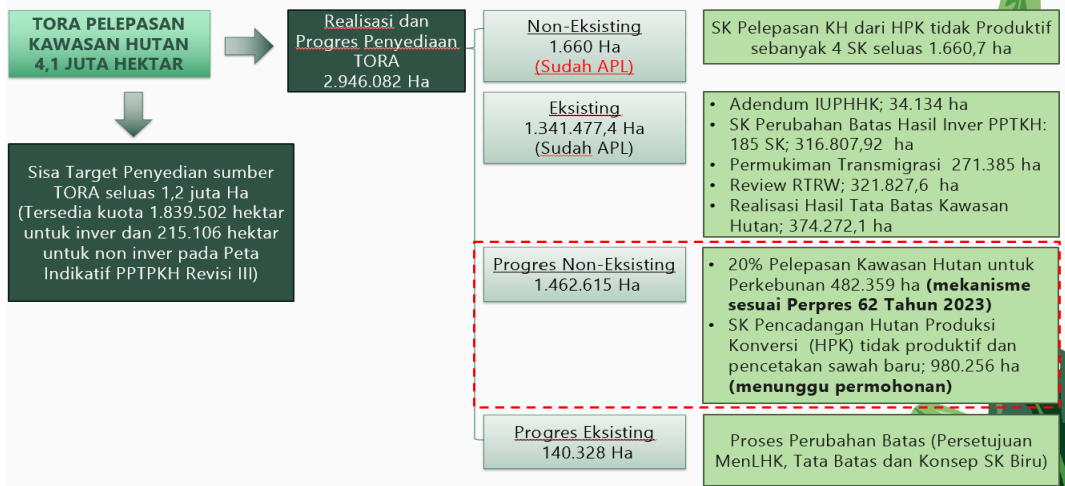
Melalui Penataan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan
(Pasal 129)

- (1) Dalam rangka penyelesaian tanah dalam Kawasan Hutan Negara dilakukan Penataan Kawasan Hutan.
- (2) Penataan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan.

Penataan Kawasan Hutan meliputi:

1. Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.
2. Penataan Kawasan Hutan **lebih dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan** dan Penutupan Hutan □□ **Tim Inver PPTPKH**;
3. Penataan Kawasan Hutan **kurang dari Kecukupan Luas Kawasan Hutan** dan Penutupan Hutan □□ **Tim Terpadu PPTPKH**.
4. Pelepasan Hutan Produksi yang dapat diKonversi (HPK) Tidak Produktif; □□ **Keputusan Pelepasan HPK NP atas Usulan para Pihak dilengkapi dengan pemenuhan syarat.**
5. Penyelesaian permukiman dalam kawasan hutan Kawasan Hutan □□ **Tim Inver PPTPKH / Tim Terpadu PPTPKH** tergantung areal dimaksud masuk dalam kategori **> Kecukupan luas** atau **< Kecukupan luas**.
6. Pendanaan serta Monitoring dan Evaluasi.

PROGRES TORA S.D JUNI 2024



Peta Indikatif PPTPKH/Realisasi TORA Rev III Prov Riau

No	Kabupaten	Kriteria					Total
		Alokasi 20% untuk kebun masyarakat	Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif	Lahan Garapan pertanian, perkebunan dan tambak	Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip Pelepasan Kawasan Hutan untuk transmigrasi	Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum	
1	Bengkalis	1.025	2.850	74.436		10.229	88.540
2	Indragiri Hilir	2.509	10.530	149.302		19.610	181.951
3	Indragiri Hulu	1.455	32.136	26.004	2.060	4.997	66.651
4	Kampar	505	50.466	38.042		3.746	92.758
5	Kepulauan Meranti		2.579	1.434		1.139	5.152
6	Kota Dumai		4.854	15.987		1.646	22.486
7	Kota Pekanbaru		107	1.507		154	1.768
8	Kuantan Singingi	0	23.990	21.361	19.240	2.113	66.704
9	Pelalawan	732	3.397	45.493		4.120	53.741
10	Rokan Hilir		31.201	75.004		6.622	112.826
11	Rokan Hulu	4.830	49.857	77.412	2.467	4.046	138.612
12	Siak		70	35.352		1.176	36.598
Total		11.055	212.035	561.334	23.766	59.597	867.787

Indikasi Sawit Rakyat dalam Peta Indikatif PPTPKH/Realisasi TORA Rev III Prov Riau

No	Kabupaten	Indikasi Sawit Rakyat	Lahan terbangun lainnya	Total (Ha)
1	Bengkalis	63.014	25.526	88.540
2	Indragiri Hilir	113.214	68.737	181.951
3	Indragiri Hulu	35.743	30.908	66.651
4	Kampar	51.617	41.141	92.758
5	Kepulauan Meranti	1.737	3.415	5.152
6	Kota Dumai	13.436	9.049	22.486
7	Kota Pekanbaru	1.460	308	1.768
8	Kuantan Singingi	22.259	44.444	66.704
9	Pelalawan	32.850	20.891	53.741
10	Rokan Hilir	88.144	24.682	112.826
11	Rokan Hulu	97.603	41.009	138.612
12	Siak	31.752	4.847	36.598
Total		552.829	314.958	867.787

Percepatan Sawit Rakyat



2. Berikan keterangan berikut ini, kami sampaikan:

- Penyelesaian indikasi sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui mekanisme inventarisasi dan verifikasi PPTPKH.
- Dalam rangka percepatan penyelesaian indikasi sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan agar Daerah segera melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdapat indikasi sawit rakyat dalam Peta Indikatif PPTPKH.
- Pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH indikasi sawit rakyat mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Demi ini kami sampaikan untuk dilaksanakan.

Tembusan:

- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dirjen PKTL melalui Nota Dinas Nomor ND.303/PKTL/PPKH/PLA.4.1/B/03/2024 tanggal 21 Maret 2024, menyampaikan kepada seluruh Kepala BPKHTL bahwa :

- Penyelesaian indikasi sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan dilaksanakan melalui mekanisme inventarisasi dan verifikasi PPTPKH.
- Dalam rangka percepatan penyelesaian indikasi sawit rakyat yang berada dalam kawasan hutan agar Kepala BPKHTL segera melakukan sosialisasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terdapat indikasi sawit rakyat dalam Peta Indikatif PPTPKH.
- Pelaksanaan Inventarisasi dan verifikasi PPTPKH indikasi sawit rakyat mengikuti tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021.

Proses rencana penyelesaian Kebun Sawit Rakyat di Kabupaten Pelalawan sebagai berikut:

- Sosialisasi tanggal 5 Juni 2024.
- Usulan Bupati Pelalawan 34.000 ha.
- Ketersediaan Anggaran di BPKHTL Pekanbaru hanya untuk 15.000 ha.
- Pelaksanaan Inver Lapangan tanggal 23 Juli 2024.

4. Tanggapan DPR RI

Permasalahan-permasalahan di atas adalah satu contoh yang harus ada tindak lanjutnya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan dikerjakan dalam waktu segera, karena permasalahan kebun sawit rakyat di Riau itu ada masalah tata ruang dan kawasan hutan. Selain itu, pemerintah harus menyelesaikan dengan menerbitkan UU Sipta Kerja, banyak sertifikat yang terbit karena kawasan hutan. Sedangkan dari Dirjen Perkebunan sedang dilakukan revisi Permentan usulan PSR yang ada dalam menyelesaikan sawit dalam kawasan hutan.

Kondisi Taman Nasional ditanami kelapa sawit sangat disayangkan, di satu sisi tidak bisa menyalahkan rakyat karena rakyat butuh makan untuk kehidupan dan di sisi yang lain yang punya kawasan hutan tidak bisa

menjaganya karena mereka tidak ada petugas yang cukup untuk menjaganya. Karena kedua faktor tersebut taman nasional yang ada dirambah dan ada juga yang dianggap tanah kosong sehingga mereka olah, tapi yang sangat disayangkan waktu masih sedikit kenapa tidak diberitahu bahwa ini adalah taman nasional dan tidak boleh ditanami kelapa sawit, kecuali hutan lindung itu pun ada ketentuannya. Penyelesaian dalam permasalahan ini, kita inginkan negara jangan sampai dirugikan dan rakyat jangan sampai sengsara.

Mengenai potensi pertanian, perikanan, kelautan yang ada di Kabupaten Pelalawan ini, berharap kepada kementerian untuk ditindaklanjuti. Jangan sampai kunjungan Komisi IV ke Provinsi Riau tidak ada tindak lanjutnya dan kita tidak bisa memanfaatkan sumber daya yang sudah ada di Kabupaten Pelalawan ini.

B. KUNJUNGAN KE UNIT PENGOLAHAN IKAN PATIN KOTA PEKANBARU

1. Profil Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tiga Caneca di Kota Pekanbaru

- a. Visinya menjadi perusahaan yang handal dan terpercaya dengan mengedepankan profesionalisme kerja. Misnya:
 - 1) menjadi yang terbaik dan terpercaya di bidang manajemen, produksi, distribusi dan perdagangan,
 - 2) usaha yang berkelanjutan dalam membangun jaringan bisnis perusahaan,
 - 3) menjalankan standar perusahaan dengan baik terhadap manajemen perusahaan, pengontrol kualitas produk dan pelayanan kepada pelanggan,
 - 4) menghasilkan produk unggulan dengan kualitas terbaik,
 - 5) mengupayakan merk fillet sumodori (patin beku) sebagai produk lokal unggulan di Pekanbaru,
 - 6) mengusahakan memberikan pelayanan yang profesional untuk menjamin kepuasan para pelanggan,
 - 7) senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi yang efisien dan teknologi yang berkembang.
- b. Tiga Caneca berdiri pada tahun 2015 dan mulai beroperasi di tahun

2019 yang dipimpin oleh Harrio Ismi Caneca. Telah memasarkan produk Fillet Patin Beku ke berbagai tempat seperti Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Catering, Swalayan, dan Pedagang Pasar Dalam Negeri dengan total sebanyak 103 ton dengan nilai penjualan Rp4.294.000.000,00 pada tahun 2023.

- c. Bahan baku berasal dari hasil Budidaya ikan di Keramba Danau PLTA Koto Panjang yang setiap tahunnya menghasilkan 124 ton / tahun. Produk yang dipasarkan dikemas menggunakan Plastik FE dengan ukuran 23 cm x 35 cm.
- d. Telah memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) dengan nomor registrasi SKP No.30641/14/SKP/BK/II/2024 dengan masa berlaku 05 Februari 2024 s.d 05 Februari 2026.
- e. Bahan baku UPI Tiga Caneca sebagai berikut:

DESKRIPSI BAHAN BAKU

1.	Nama Bahan Baku	Ikan Patin Hidup
2.	Nama Spesies	<i>Pangasius Sp</i>
3.	Bentuk Bahan Baku	Ikan utuh
4.	Asal Bahan Baku	Ikan Keramba Danau PLTA Koto Panjang
5.	Penerimaan Bahan Baku	Ikan Hidup
6.	Persyaratan Bahan Baku	Masih Hidup
7.	Tipe Pengemasan	Plastik
8.	Pemasaran	Hotel, Restoran, Rumah Sakit, Catreing, Swalayan, Pedagang Pasar

DESKRIPSI PRODUK AKHIR

1.	Nama Produk Akhir	Fillet Patin Beku
2.	Nama Jenis produk	Pembekuan
3.	Tahapan Proses	<ul style="list-style-type: none">- Penerimaan/Penyiapan bahan baku- Pemotongan dan Penyiangan- Pencucian I- Pemiletan- Penyucian II- Penirisan dan penyusunan di dalam loyang- Pembekuan I dalam Freezer 12 jam- Glazing- Pembekuan II dalam Freezer 18 jam- Penyimpanan stok di chiller- Pengemasan
4.	Komposisi	Fillet Ikan Patin
5.	Pengemasan	Plastik PE
6.	Umur Simpan	6 bulan
7.	Kondisi Penyimpanan	Freezer dan Chest Freezer
8.	Spesifikasi Label	Merek dagang produk Sumodori
9.	Metode Distribusi	Distribusi ke Hotel, Restoran, agen dan online
10.	Petunjuk Penggunaan	-
11.	Tujuan Pemasaran	Masyarakat Umum
12.	Konsumen	Hotel, Rumah sakit, masyarakat umum

2. Paparan Pemerintah

- a. Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (Riau Bersatu).
- b. Tantangan UPI yakni:
 - 1) Lebih dari 95% pelaku usaha didominasi oleh upi skala mikro kecil.
 - 2) Mutu produk olahan perikanan Skala UMKM yang rendah.
 - 3) Pengetahuan manajemen & pengelolaan keuangan yang masih terbatas.
 - 4) Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha KP skala mikro kecil.
 - 5) Masih terbatasnya penerapan teknologi pengolahan dan pemasaran inovatif.
 - 6) Lokasi produksi yang terfragmentasi belum didukung dengan sistem logistik ikan yang efisien.
 - 7) Potensi pasar yang belum sepenuhnya dapat diakses oleh UMKM.
- c. Kebijakan untuk peningkatan produksi pengolahan perikanan:
 - 1) Upaya untuk meningkatkan pengembangan produk olahan perikanan skala menengah/besar.
 - 2) Pembinaan dan penerapan standar pengolahan produk perikanan.
 - 3) Fasilitasi usaha pengolahan produk perikanan.

- d. Aksi program kegiatan peningkatan produksi pengolahan perikanan di Provinsi Riau:
- 1) Bantuan Hibah Tahun 2019 (Pelalawan 3 Kelompok (Freezer), Inhu 3 UMKM (Freezer), Inhil 1 KUB (Freezer), Kampar 7 Kelompok (Freezer, Meja Stainless Steel dan Timbangan).
 - 2) Hasil Pembinaan: Tahun 2022: 44 SKP, Tahun 2023 : 15 SKP dan Tahun 2024 sampai tanggal 11 Juli 2024: 15 SKP.
 - 3) Gemarikan: Diversifikasi Produk Olahan Perikanan dan Peningkatan Aki (Kampanye Makan Ikan Se-Provinsi Riau, Pemberian Makanan Tambahan di Pekanbaru, Siak, Kuansing, Inhu dan Inhil).
 - 4) Pembiayaan usaha dari lembaga keuangan yang difasilitasi oleh pendamping sebanyak 40 pelaku usaha (Kampar 20, Bengkalis 20) dengan nilai total sebesar Rp1.117.000.000 yang bersumber dari Lembaga Keuangan LPMUKP, PKBL PLN, dan KUR BRI.
 - 5) Sertifikat Standar yang sudah terbit sampai Tahun 2024 berjumlah 2 UPI.
- e. Data Jumlah UPI Dan Produksi di Provinsi Riau 2022-2023

NO	KAB/KOTA	JUMLAH UPI		PRODUKSI	
		2022	2023	2022	2023
1	Bengkalis	72	76	0,139	0,109
2	Indragiri Hilir	70	79	0,050	0,066
3	Indragiri Hulu	10	8	0,003	0,006
4	Kampar	60	47	14,550	12,030
5	Kepulauan Meranti	640	400	0,803	0,803
6	Kota Dumai	46	45	1,505	0,896
7	Kota Pekanbaru	92	101	0,270	0,244
8	Kuantan Singingi	76	82	0,040	0,065
9	Pelalawan	63	63	0,359	0,332
10	Rokan Hilir	53	53	11,487	11,102
11	Rokan Hulu	15	18	0,050	0,041
12	Siak	26	26	0,033	0,033
	Total	1.223	998	29,288	25,725

- f. Data Jumlah UPI dan Produksi di Kota Pekanbaru 2022-2023

NO	JENIS PENGOLAHAN	JUMLAH UPI		PRODUKSI (TON)	
		2022	2023	2022	2023
1	Pelumatan Daging/Surimi	41	32	70,39	65,19
2	Pembekuan	3	2	151,38	119,73
3	Pemindangan	2	5	2,13	3,17
4	Pengasapan/Pemanggangan	25	25	23,30	24,22
5	Pengolahan Lainnya	21	36	22,30	31,27
	Total	92	100	269,50	243,58

g. Produk olahan perikanan unggulan kabupaten/kota di Provinsi Riau

NO	Kab/Kota	PRODUK UNGGULAN
1	Bengkalis	Ikan Salai, Kerupuk Ikan
2	Indragiri Hilir	Amplang Ikan, Ikan Asin
3	Indragiri Hulu	Ikan Asap
4	Kampar	Ikan Asap, Penanganan Produk segar
5	Kepulauan Meranti	Kerupuk Ikan/Kerupuk Udang, Ikan Asin
6	Kota Dumai	Ikan Kering, Penanganan Produk segar
7	Kota Pekanbaru	Ikan Salai, Fillet
8	Kuantan Singingi	Ikan Salai
9	Pelalawan	Ikan Asin dan Ikan Salai
10	Rokan Hilir	Ikan Salai, Ikan Asin, Terasi dan Kerupuk
11	Rokan Hulu	Ikan Salai
12	Siak	Ikan Bilis Asam dan Ikan Salai

h. Data Ekspor Provinsi Riau

- 1) Th. 2021: 351579838900
- 2) Th. 2022: 624872160828
- 3) Th. 2023: 261899906118

i. Industrialisasi pengolahan perikanan Provinsi Riau



j. Pemasaran Komoditas Unggulan Produk Segar di Provinsi Riau

No	Komoditas Unggulan	Daerah Produksi	Pemasaran
1.	Ikan Patin	Kampar	1. Dumai
			2. Pekanbaru
			3. Bengkalis
			4. Pelalawan
			5. Prov. Jambi
			6. Prov. Palembang
			7. Prov. Sumbar
2.	Udang Vanamei	Bengkalis	1. Pekanbaru
			2. Negara Malaysia
3.	Ikan Nila	Kuantan Singingi	1. Indragiri Hulu
			2. Indragiri Hilir
			3. Pekanbaru
			4. Dumai
4.	Kerang Darah	Rohil dan Inhil	1. Pekanbaru
			2. Dumai
			3. Tj. BAlai Asahan (Sumut)
			4. Bengkalis
			5. Malaysia
			6. Thailand
5.	Kepiting Bakau	Rohil dan Inhil	1. Batam (Kepri)
			2. Pekanbaru
			3. Malaysia

3. **Aspirasi**

- a. Pembinaan mutu, pendampingan UMKM dan akses pasar yang lebih luas guna peningkatan kesejahteraan Pokhlahsar.
- b. Penambahan infrastruktur sarana dan prasarana di UPI yang higienis sesuai standar yang ditetapkan pemerintah KKP.
- c. Dirjen Penguatan Daya Saing, KKP akan membantu alat penyimpanan patin beku sebanyak 3 chest freezer.

4. **Tanggapan DPR RI**

- a. Komisi IV DPR RI meminta UPI Tiga Caneca dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat dalam penerapan mutu, SKP, dan HACCP serta ke depan mampu melakukan ekspor.
- b. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dapat membantu UPI Tiga Caneca dalam sarana dan prasarana, misalnya lantai diganti sesuai standar, melainkan bukan keramik karena dapat memicu kuman (rentan bakteri), ruangan fillet tertutup agar lalat tidak masuk ke tempat

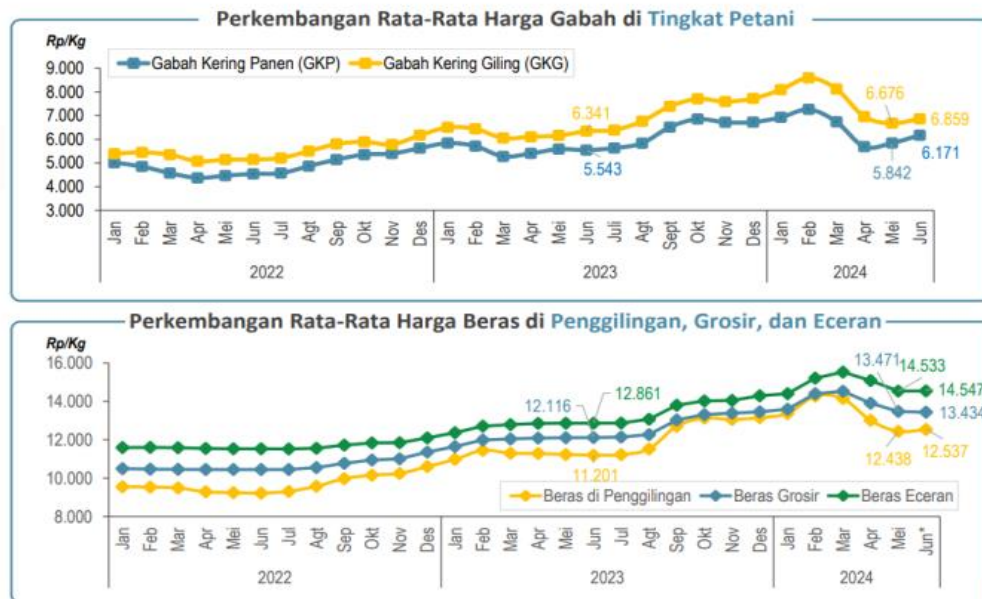
prosesing, serta perlu ada tempat cuci kaki.

- c. Komisi IV DPR RI mendorong ID Food/Bapanas dapat bekerja sama menyerap produk lokal ikan patin beku untuk dipasarkan atau dimasukkan dalam program utama asupan makan siang anak-anak, mengingat ikan memiliki protein yang tinggi dan meningkatkan kecerdasan.

C. PENINJAUAN GUDANG BULOG

1. Paparan Pemerintah

- a. Pertemuan hari ini dilakukan dengan tujuan untuk duduk bersama guna membahas stok pangan dan harga untuk menjadka ketahanan pangan Negara. Pada saat pertemuan terungkap bahwa produksi komoditas pangan strategis di Provinsi Riau tidak mampu mencukupi kebutuhan pangannya. Sehingga dibutuhkan pasokan dari luar. Diantaranya beras premium, unggas, daging sapi. Selain itu pada saat kunjungan juga disampaikan bahwa harga beras/gabah masih tinggi. Menanggapi hal tersebut, adalah untuk hal-hal atau komoditas yang mempengaruhi inflasi, khususnya beras agar bekerja sama dengan Perum Bulog.
- b. Adapun terkait dengan perkembangan harga, disampaikan oleh pihak Perum Bulog, Terjadi tren penurunan harga baik pada gabah di tingkat petani maupun beras di tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Salah satu penyebabnya ketersediaan stok masih pada tingkat ideal.. Meskipun demikian, harga pada Juni 2024 baik untuk gabah di tingkat petani maupun beras di tingkat penggilingan grosir dan eceran masih tetap lebih tinggi dibandingkan dengan harga Mei 2023 maupun Juni 2023.
- c. Khusus untuk komoditas beras pada bulan Juni 2024 memberikan andil/sumbangan inflasi sebesar 0,004%. Andil/sumbangan inflasi beras menunjukkan kenaikan (inflasi) jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Beras diperkirakan akan terus mengalami inflasi pada bulan Juli 2024 mengingat telah melewati musim panen.



- d. Dalam rangka pengendalian harga terdapat beberapa strategi baik yang diterapkan secara nasional, yaitu pemantauan harga yang harus aktif dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah' memastikan ketersediaan pasokan melalui produksi lokal dan impor; program bantuan benih dan pupuk bagi petani, serta pengembangan sistem logistik yang efisien. Selain itu, Pemerintah Daerah agar menerapkan mekanisme stabilisasi harga, dan tidak lupa agar Pemerintah Daerah aktif melibatkan masyarakat dalam pengendalian harga pangan. Masyarakat Pemda melibatkan masyarakat dalam pengendalian harga pangan. Misalnya, membentuk kelompok tani, koperasi, dan pasar murah untuk membantu mendistribusikan pangan dengan harga yang terjangkau.
- e. Adapun langkah-langkah yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Riau, diantaranya adalah peningkatan produksi beras melalui program intensifikasi (penggunaan varietas unggul, pupuk dan pestisida yang tepat, serta sistem tanam yang efisien) dan Ekstensifikasi (perluasan lahan sawah dan pengembangan teknologi budidaya padi yang lebih maju). Kemudian, meningkatkan efisiensi distribusi, diantaranya melalui pembangunan infrastruktur logistik yang memadai. Serta, meningkatkan peran petani dalam pengendalian harga pangan. Diantaranya melalui akses permodalan yang terjangkau, akses terhadap teknologi pertanian yang tepat guna, serta meningkatkan

bargaining power petani dalam menjual hasil panen.

- f. Selain itu, pada saat pertemuan disampaikan oleh Perum Bulog mengenai kinerja operasional Perum Bulog Wilayah Riau – Kepulauan Riau, dimana Pengadaan gabah/beras PSO Dalam Negeri di Kanwil Riau belum terealisasi karena perkembangan harga gabah/beras di cenderung masih diatas HPP yang ditetapkan pemerintah (Peraturan Bapanas No. 4 Tahun 2024). Adapun beberapa upaya yang dilakukan agar dapat memenuhi target adalah, aktif berkoordinasi dengan stakeholder seperti petani/gapoktan/mitra penggilingan padi, serta bersinergi dengan Pemda setempat guna kelancaran, optimalisasi serta dukungan kegiatan penyerapan tersebut.
- g. Berikut Rincian Bantuan Pangan Kanwil Riau-Kepri

Tahap 1								Tahap 2									
KAB/KOTA	Unit Kerja	PAQU	Realisasi						KAB/KOTA	Unit Kerja	PAQU	Realisasi					
			Januari	%	Februari	%	Maret	%				Total	%	April	%	Mei	%
KAB BINTAN	03010 - KANCAB TANJUNG PINANG	22	73	100%	73	100%	73	100%	220	100%							
KAB KEPLAUAN ANAMBAS	03010 - KANCAB TANJUNG PINANG	5	16	100%	16	100%	16	100%	48	100%							
KOTA TANJUNG PINANG	03010 - KANCAB TANJUNG PINANG	23	78	100%	78	100%	78	100%	233	100%							
KAB LINGGA	03010 - KANCAB TANJUNG PINANG	32	105	100%	105	100%	105	100%	315	100%							
KAB NATUNA	03000 - KANCAB NATUNA	13	43	100%	43	100%	43	100%	130	100%							
KAB KARULIN	03020 - KANCAB BATAM	32	108	100%	108	100%	108	100%	323	100%							
KOTA BATAM	03020 - KANCAB BATAM	116	360	100%	360	100%	360	100%	1.048	100%							
KAB KAMPAR	03001 - KANMIL RIAU DAN KEPRI	148	487	100%	487	100%	487	100%	1.480	100%							
KOTA PEKANBARU	03001 - KANMIL RIAU DAN KEPRI	51	171	100%	171	100%	171	100%	513	100%							
KAB PELALAWAN	03001 - KANMIL RIAU DAN KEPRI	47	157	100%	157	100%	157	100%	470	100%							
KAB SIAK	03001 - KANMIL RIAU DAN KEPRI	53	176	100%	176	100%	176	100%	527	100%							
KAB ROKAN HULU	03070 - KANCAB KAMPAR	84	281	100%	281	100%	281	100%	844	100%							
KOTA DUMAI	03020 - KANCAB DUMAI	44	148	100%	148	100%	148	100%	444	100%							
KAB ROKAN HILIR	03020 - KANCAB DUMAI	112	372	100%	372	100%	372	100%	1.117	100%							
KAB BENGKALIS	03040 - KANCAB BENGKALIS	79	264	100%	264	100%	264	100%	791	100%							
KAB KEPLAUAN MERSANTI	03040 - KANCAB BENGKALIS	101	336	100%	336	100%	336	100%	1.007	100%							
KAB INDRAGIRIH HILIR	03050 - KANCAB TEMBILAHAN	97	324	100%	324	100%	324	100%	971	100%							
KAB INDRAGIRIH ULU	03060 - KANCAB RENGAT	65	216	100%	216	100%	216	100%	648	100%							
KAB KLUANTAN SINGINGI	03060 - KANCAB RENGAT	68	227	100%	227	100%	227	100%	680	100%							

- h. Posisi Stok dan Sebaran Komoditas Pangan Kanwil Riau-Kepri

Stok Komoditas Beras				
satuan : Ton				
No	Unit Kerja	Stok CBP	Stok Komersial	Total
1	Kanwil Riau-Kepri	3.404	12	3.415
2	Kancab Tanjung Pinang	918	31	949
3	Kancab Dumai	11.538	274	11.812
4	Kancab Batam	1.335	10	1.344
5	Kancab Bengkalis	772	215	987
6	Kancab Tembilahan	528	5	533
7	Kancab Rengat	191	1	192
8	Kancab Kampar	491	17	508
9	Kancab Natuna	530	12	543
Total		19.707	577	20.283

Stok Komoditas Pangan Lain			
Tepung Terigu 4 Ton	Minyak Goreng 88 Kilo Liter	Gula Posir 109 Ton	Telur 39 Ton

2. Diskusi

- a. Menanggapi kekurangan komoditas pangan, Bapanas telah melakukan intervensi pasar melalui gerakan pasar murah, bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, serta kebijakan fasilitasi distribusi pangan.
- b. Menanggapi kebutuhan daging sapi/kerbau untuk Provinsi Riau dan Kepri, dari pihak ID Food menerangkan bahwa terdapat kandang GPS di Banten serta telah melakukan importasi sapi hidup, agar dapat didistribusikan hingga ke Riau-Kepri, semua tergantung penugasan dari Bapanas.
- c. Selain itu, Kementerian Pertanian menyampaikan beberapa upaya untuk meningkatkan produksi pangan, diantaranya melalui pompanisasi, pengembangan padi gogo, dan optimalisasi lahan. Namun permasalahannya, masih terkendala pasokan benih yang mencukupi, terutama untuk padi Gogo. Meskipun petani banyak yang menjadi penangkar, namun belum ada sertifikasinya. Untuk memenuhi target produksi Provinsi Riau seluas 30 ribu ha, diperlukan bibit dan alsintan yang memadai.

3. Tanggapan DPR

- a. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam upaya peningkatan produksi komoditas pangan, harus memperhatikan agroklimat dan potensi masing-masing wilayah.
- b. Komisi IV DPR RI mengkritisi kebijakan pangan yang dinilai memiliki mindset impor, seharusnya bagaimana upaya untuk meningkatkan produksi pangan.
- c. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian harus memiliki rencana kerja yang terukur, hal ini berkaitan dengan akses bantuan pemerintah. Selain itu, pola kemitraan agar diperbaiki, dimana petugas Bulog harus proaktif dan akses Gapoktan ke Perum Bulog harus dibuka.
- d. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah memiliki data valid terkait kebutuhan bantuan pangan, khususnya untuk Provinsi Riau-Kepri.

IV. KESIMPULAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera melakukan penyelesaian kebun-kebun sawit rakyat yang telah terbangun di dalam kawasan hutan melalui skema yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencari solusi jangka pendek dan jangka panjang untuk menyelesaikan kasus perambahan Taman Nasional Tesso Nillo.
3. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Pemkot Pekanbaru untuk membantu melakukan pendampingan secara inten serta membantu sarana prasarana terhadap UPI di daerah-daerah yang potensial sesuai standar yang ditetapkan hingga mampu melakukan ekspor. Selain itu, Komisi IV DPR RI meminta Unit Pengolahan Ikan (UPI) Tiga Caneca Kota Pekanbaru Prov. Riau dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi masyarakat dalam penerapan mutu, SKP, dan HACCP pengolahan ikan patin beku.
4. Komisi IV DPR RI mendorong ID Food/Bapanas dapat bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menyerap produk lokal ikan patin beku hasil binaan untuk dimasukkan dalam program utama asupan makan siang bagi anak-anak, mengingat ikan memiliki protein yang tinggi dan meningkatkan kecerdasan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah dalam upaya peningkatan produksi komoditas pangan, harus memperhatikan agroklimat dan potensi masing-masing wilayah. Selanjutnya meminta Kementerian Pertanian agar memiliki rencana kerja yang terukur. Hal ini berkaitan dengan akses bantuan pemerintah kepada masyarakat.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah memiliki data valid terkait kebutuhan bantuan pangan, khususnya untuk Provinsi Riau-Kepri.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, dan BUMN terkait, untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta menindaklanjuti masukan dan aspirasi yang disampaikan dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 ke Provinsi Riau. Selanjutnya Komisi IV DPRRI akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan akan kami bawa dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya masyarakat Provinsi Riau.

Jakarta, Juli 2024

Ketua Tim,

Ttd.

SUDIN, S.E.

A-151

FOTO KEGIATAN



LIPUTAN MEDIA

- <https://pelalawankab.go.id/web/bupati-zukri-harapkan-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-dalam-mensupport-potensi-sumber-daya-alam-di-kabupaten-pelalawan/>.
- <https://riau.bsip.pertanian.go.id/berita/bsip-riau-dampingi-kunker-komisi-iv-dpr-ri-ke-kabupaten-pelalawan#:~:text=Komisi%20IV%20DPR%20RI%20melaksanakan,%2C%20Pangka%20Kerinci%2C%20Kabupaten%20Pelalawan.>
- <https://pelalawanpos.co/news/detail/2692/reses-di-pelalawan-ketua-komisi-iv-dpr-ri-sudin-tegaskan-tidak-setuju-dengan-kata-ketelanjangan>
- <https://idfood.co.id/blog/idfood-komisiiv-reses>
- <https://indonesiakini.go.id/berita/9587621/bupati-zukri-harapkan-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-dalam-mensupport-potensi-sumber-daya-alam-di-kabupaten-pelalawan>
- <https://riau.harianhaluan.com/daerah/1113138921/bupati-zukri-harapkan-dukungan-komisi-iv-dpr-ri-dalam-mensupport-potensi-sumber-daya-alam-di-kabupaten-pelalawan>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50620/t/Maknai+Pangan+sebagai+Identitas+Bangsa%2C+Cadangan+Beras+Harus+Bersumber+dari+Dalam+Negeri>
- <https://sipuanpenari.pekanbaru.go.id/p/posts/menghadiri-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-reses-masa-persidangan-v-tahun-sidang-2023-2024>
- <https://www.riaumandiri.co/read/detail/115919/komisi-iv-dpr-ri-apresiasi-upi-tiga-caneca-pekanbaru>
- <https://sipuanpenari.pekanbaru.go.id/p/posts/menghadiri-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-reses-masa-persidangan-v-tahun-sidang-2023-2024-ke-upi-tiga-caneca-food-factory>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50570/t/Pemerintah%20Pusat-Daerah%20Harus%20Kembangkan%20Sentra%20Hilirisasi%20Produk%20Perikanan>
- https://x.com/DPR_RI/status/1813207888481173796?mx=2
- https://www.instagram.com/dpr_ri/
- <https://tv.sinpo.id/detail/kunker-reses-komisi-iv-dpr-ke-unit-pengolahan-ikan>
- <https://faktanusantaraemas.com/kunker-reses-komisi-iv-dpr-ri-unit-pengolahan-ikan-di-pekan-baru/>
- <https://sipuanpenari.pekanbaru.go.id/p/posts/menghadiri-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-reses-masa-persidangan-v-tahun-sidang-2023-2024>
- <https://idfood.co.id/blog/idfood-komisiiv-reses>
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50620/t/Maknai+Pangan+sebagai+Identitas+Bangsa%2C+Cadangan+Beras+Harus+Bersumber+dari+Dalam+Negeri>

